

HUBUNGAN ANTARA KINERJA APBD DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBELUM DAN SESUDAH ERA OTONOMI DAERAH PEMERINTAH KOTA DI JAWA TIMUR

Nekky Rahmiyati

Abstract

Local Budget as one of the local financial policy needs to be appraised its performance. Based on this appraisal the achievement of goals and targets can be appraised. One of appraisal of financial performance is using the ratio analysis, among others: ratio of independency, ratio of efectivity, ratio of activity and ratio of growth.

The samples of this study are eight cities in Province of East Java. It's not including Batu City because of the city considered too young to be sample of this research (exist in the year of 2001). The dates of the research is secondary dates during periods of 1993-1997 (before the self-regulations era) and the periods of 2001-2005 (during self-regulation era). The period of 1998-2000 exclude from the sample because it was the periods which monetary crisis had take place. The dates that had been analyzed including Local Budget, Product Domestic Regional Bruto, Labour/manpower, Foreign Investment and Domestic Investment, Product Domestic Regional Bruto per capita, rate of literacy, average of years for schooling, and rate of live expectancy. The collecting dates have been analyzed descriptively and quantitatively. The quantitative analysis used t-test technique and partial least square analysis.

The study found that financial performance have significant effect toward social welfare before self-regulation era, and finance performance have non significant effect toward social welfare during self-regulation era, investment growth have significant effect toward social welfare before self regulation era, and investment growth have non significant effect toward social welfare during self regulation era, labour/manpower absorption have significant effect toward social welfare before and during self regulation era.

Key Word : Local financial performance, economical growth, investment growth, and social welfare

Latar Belakang

Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, maka undang-undang ini meletakkan titik berat otonomi di daerah kabupaten/kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota yang berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat tersebut.

Dasar pembentukan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah TAP MPR RI No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Tap MPR XV/MPR/1998

menyatakan: "Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah" (pasal 1).

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola

potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal. Sejalan dengan hal itu, pemerintah daerah diberi hak otonomi untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. APBD yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah yang merupakan salah satu pemicu tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Di Indonesia, proses perencanaan APBD dengan pendekatan kinerja menekankan pada pendekatan *bottom-up planning* dengan memperhatikan arah pembangunan nasional, sedangkan ditingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yaitu rencana strategis daerah (RENSTRADA) yang tidak menyimpang dari program pembangunan nasional (PROPENAS), tetapi dengan penekanan prioritas pembangunan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain sesuai potensi dan kondisi daerah. Berdasarkan rencana strategis daerah, pemerintah daerah bersama dengan DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD, dan pemerintah daerah menetapkan strategi dan prioritas APBD yang akan memperjelas program kerja tahunan pemerintah daerah, sasaran yang ingin dicapai dan serta kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut dengan memperhatikan: (a) pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari hasil evaluasi kinerja pemerintah; (b) masukan-masukan dan aspirasi masyarakat; (c) pengkajian kondisi lingkungan strategis yang terjadi, sehingga bisa diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi (Badrul Munir, 2003: 45)

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah dan hal ini telah ditanggapi oleh pemerintah dan wakil rakyat pada tataran hukum yang berupa

Tap MPR No.XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keduanya menunjukkan tekad pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Menurut James (dalam Mardiasmo, 2002:73) hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk perencanaan (pemilihan alternatif strategi, pemilihan prioritas, perubahan arah kebijakan), penganggaran (sebagai rujukan terhadap penggunaan sumber daya, pengembangan biaya pencapaian target), implementasi (hasil aktual diperiksa terhadap anggaran dan tujuan, pedoman tindakan koreksi) dan evaluasi (membantu menunjukkan efektivitas program, cara yang terbaik untuk implementasi program). APBD yang merupakan salah satu bentuk kebijakan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pengukuran kinerja karena pada sektor publik tidak semuanya berorientasi laba tetapi juga pelayanan, maka pengukuran kinerja akan memberikan manfaat seperti peningkatan kualitas jasa dan produk, memastikan akuntabilitas dan pengendalian, peningkatan kualitas praktik manajemen, formulasi kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran, pengukuran Kinerja Keuangan dapat dilakukan dengan analisa rasio yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama.

APBD digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan besarnya penerimaan dan pengeluaran berbagai sektor yang difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas antara lain: pemberian

peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi, kebijakan pengembangan industri, menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang kesemuanya itu akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat dan mempengaruhi tumbuhnya perekonomian suatu daerah. Kebijakan keuangan daerah dalam pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia serta infrastruktur yang tersedia, sehingga dengan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dimungkinkan daerah untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang tentu membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran daerah pada prinsipnya bertujuan untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, terjadinya krisis ekonomi membuka pemikiran tentang strategi yang pada mulanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi bergeser pada pemberdayaan seluruh masyarakat, hal ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja atau akan meningkatkan penduduk yang mempunyai usaha atau bekerja. Penelitian Azran (2007) yang menyatakan penerimaan royalti pertambangan batu bara (APBD) tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja seluruh sektor di Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi anggaran belanja pembangunan atau belanja publik dibidang kesejahteraan masyarakat merupakan implementasi kebijakan anggaran oleh pemerintah daerah, peningkatan alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat tidak akan ada artinya jika jumlah penduduk miskin juga meningkat. Hubungan antara APBD dengan kesejahteraan masyarakat ini

ditunjukkan dalam penelitian Panjaitan (1996) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun $n-1$ berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Produk domestik Bruto (PDB) per kapita tenaga kerja. Menurut penelitian Azran (2007) Penerimaan Royalti pertambangan batu bara tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum mengalami peningkatan yang berarti dari waktu ke waktu. Peningkatan itu terjadi dalam konteks demografis, walaupun jumlah penduduk masih terus bertambah tetapi jumlah penduduk masih terus bertambah tetapi kecepatan pertumbuhannya terus berkurang sebagai akibat turunnya angka kelahiran. Berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain: Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi di bidang pendidikan misalnya Biaya Operasional Sekolah (BOS), subsidi bidang kesehatan.

Permasalahan penelitian ini adalah berikut; Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebelum dan pada era otonomi daerah? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menganalisis, pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sebelum dan pada era otonomi daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif karena bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal variabel kinerja APBD terhadap variabel kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat diketahui efektifitas kebijakan APBD yang dilakukan pemerintah kota di Jawa Timur.

Populasi Penelitian

Populasi diartikan sebagai keseluruhan subyek penelitian dan

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota yang ada di Propinsi Jawa Timur yang meliputi : Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kota Batu .

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, sampel penelitian ini adalah semua pemerintah Kota di Propinsi Jawa Timur kecuali Kota Batu karena terbentuknya Kota Batu pada era Otonomi Daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji T dan analisis model persamaan struktural (SEM) dengan paket *Smart PLS*

Analisis Uji T

Dalam statistik deskriptif, untuk mengetahui karakteristik sebuah populasi dilakukan prosedur statistik deskriptif yang hasilnya adalah parameter misalnya rata-rata (*mean*). Setelah melakukan perkiraan (estimasi) terhadap populasi maka dilakukan uji hipotesis. Metode statistik parametrik yang diterapkan untuk inferensi terhadap dua rata-rata populasi adalah menggunakan uji t (*t test*) dan F test, karena sampel bisa saling berhubungan (*dependent*) atau kedua sampel tidak ada hubungannya (*independent*). Dalam penelitian ini digolongkan sampel kecil dan dengan tingkat kepercayaan 95 % atau tingkat signifikansi (α) 5 %

Analisis Model Partial Least Square (PLS)

Partial Least Square merupakan metode analisis yang dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dimana teorinya lemah dan atau indikator yang tersedia tidak memenuhi model pengukuran refleksif, tetapi formatif. PLS sebagai "*soft modeling*" merupakan metode analisis yang powerful karena dapat diterapkan pada semua skala data, dan tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sample tidak harus besar. PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang

belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian proposisi. (Solimun, 2006: 57)

Jenis Model

Peneliti menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) yaitu permodelan yang menggambarkan hubungan yang dihipotesiskan antar konstruk (variabel laten) yang menjelaskan kausalitas termasuk didalamnya kausalitas berjenjang.

Landasan Teori

Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan dilandasi argumen adanya dimensi kualitatif yang lebih penting dibanding pertumbuhan ekonomi menurut Meier (dalam Kuncoro 2003:9) :

"... Perhaps the definition that would now again wields approval is one defines economic development as the process whereby the real percapita income of a country increases over a long period of time- subject to the stipulations that the number of people below an 'absolute poverty line' does not increase, and that the distribution of income does not more unequal".

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Oleh karena itu, Todaro (2004:26) mengatakan bahwa: "keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu : (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak manusia". Demikian juga dikemukakan Dudley Seers (dalam Kuncoro, 2003:10) menunjuk tiga sasaran utama pembangunan dengan mengatakan:

" ...What has been happening to poverty? What has been happening unemployment? What has been to inequality? If all three of these have declined from high level then beyond doubt this has been a period of development for the country concerned. If one or two these central problems have been growing worse, especially if all three have it would be strange to call the result ' development', even if percapita income doubled".

Definisi Seers tersebut meredefinisi pembangunan dalam konteks tujuan sosial yang berorientasi kesempatan kerja, pemerataan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Dengan demikian indikator kunci pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi : (1) indikator ekonomi yaitu *Gross National Product* (GNP) per kapita dan (2) indikator sosial yaitu *Human Development Index* (HDI) atau *Physical Quality Life Index* (PQLI).

Pembangunan ekonomi dapat dipandang sebagai kenaikan pendapatan per kapita, karena kenaikan penerimaan dan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada umumnya pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk daerah kabupaten dan kota diukur dengan Produk domestik regional Bruto (PDRB).

Pada suatu saat PDRB terjadi peningkatan, saat yang bersamaan pula terjadi pertumbuhan jumlah penduduk. Pada kondisi demikian akan dapat terjadi peningkatan pendapatan per kapita bila pertumbuhan Produk domestik regional Bruto (PDRB) lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan kenyataan tersebut para ahli ekonomi membedakan pengertian antara pembangunan ekonomi (*economic development*) dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi menurut Arsyad (1999:7) sebagai :

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan PDB pada suatu tahun tertentu dikurangi dengan tingkat pertumbuhan penduduk;
2. Perkembangan PDB yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (transformasi struktural).

Untuk pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, ataukah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Menurut Musgrave (Musgrave and Musgrave, 1991:6) meskipun setiap perpajakan dan pengeluaran tertentu mempengaruhi perekonomian, masih diperlukan kebijakan-kebijakan lain guna mencapai tujuan yang lebih jauh lagi. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu : (1) Fungsi Alokasi; (2) Fungsi Distribusi; (3) Fungsi Stabilisasi.

Fungsi alokasi menyangkut penyediaan jenis barang atau jasa publik yang tidak dapat disediakan sektor swasta, atau tidak efisien bila disediakan oleh pasar. Hal ini disebabkan penyediaan terhadap jenis barang tersebut manfaatnya bisa dinikmati oleh orang banyak, atau muncul masalah "penumpang gratis" (*free riders*) yang menjadi disinsentif bagi pasar untuk menyediakan barang dan jasa publik. Persoalannya bagaimana alokasi atau sumber daya pemerintah tersebut dilakukan dengan efisien.

Fungsi distribusi adalah untuk mengatasi kegagalan pasar dalam hal distribusi pendapatan yang adil bagi masyarakat. Pasar seringkali gagal mendistribusikan pendapatan secara adil karena tidak hanya menyangkut masalah ekonomi. Ketidak-adilan tersebut disebabkan karena distribusi pendapatan melalui sistem pasar tergantung dari kepemilikan faktor-faktor produksi,

permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Sementara tidak semua rumah tangga memiliki faktor produksi yang dibutuhkan pasar. Dalam rangka inilah pemerintah perlu turun tangan memperbaiki distribusi pendapatan baik secara langsung, misalnya melalui pajak, atau secara tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah berupa subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, atau dengan kebijakan lainnya.

Fungsi Stabilisasi diperankan oleh pemerintah bila suatu sektor mengalami hambatan atau mempengaruhi sektor lainnya. Akibat yang ditimbulkan misalnya pengangguran muncul dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Ini berarti pemerintah perlu melakukan intervensi agar ekonomi makro dapat berjalan dengan baik. Dalam menanggulangi masalah-masalah ini pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan cerminan dari tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena itu Boulding (dalam Swasono, 2005:6) menyatakan bahwa *the subject matter of welfare economics*, berbeda dengan lain-lain bentuk *welfare*, harus disepakati dari konsep harta atau *riches* ekonomi. Dan mengemukakan konsep *social optimum*, yaitu *paretian optimality* (optimalitas ala Pareto dan Edworth), dimana *economic efficiency* mencapai *social optimum* bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung (*better-off*) tanpa membuat orang lain merugi (*worse-off*). Dalam pada itu pemborosan masih terjadi bila seseorang masih bisa menolong orang lain tanpa merugi. Apa yang dikemukakan Boulding ini, dalam kaitan Vilfredo Pareto dan Francis Edgeworth, Alfred Marshal dan A.C Pigou, pada dasarnya adalah *old utilitarian* dan tidak terlepas dari mekanisme *perfect competition* dalam pasar. *Welfare* dan *competition* menjadi dua sejoli diangkat di sini sebagai paradigma klasikal oleh

kaum *Smithian*. Inilah *Old welfare economics* yang berdasar pada utilitas, berorientasi harta atau kekayaan ekonomi individu dan *self-interest maximization*, yang menegaskan tercapainya *Pareto efficiency*.

Sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang dan tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat maka untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat [Morris D dalam Kuncoro (2003:28)] memperkenalkan *Physical Quality Life Index* (PQLI) yang lazim diterjemahkan sebagai Index Mutu Hidup (IMH) yang terdiri atas tiga indikator yaitu : Harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian dan tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana 1 merupakan kinerja terjelek sedangkan 100 adalah kinerja terbaik. Sedangkan menurut UNDP (*United Nations Development Program*) menggunakan HDI (*Human Development Index*) dengan meranking dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas tiga tujuan produk pembangunan, yaitu : (1) usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup; (2) pengetahuan yang diukur dari rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga); dan (3) penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara. Selain itu peningkatan pendapatan riil perkapita juga merupakan sebagian dari indeks kesejahteraan ekonomi.

Pembahasan

Kinerja APBD

Kinerja APBD ditentukan dengan melakukan analisa ratio keuangan pada APBD yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode

dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi, antara lain dengan mengukur :

Rasio kemandirian

Beberapa kota di Jawa Timur masih kekurangan sumber daya untuk membiayai seluruh kebutuhan pengeluarannya. Ternyata hasilnya rendah, rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pengeluaran, antara tahun 1993/1994 sampai dengan 1997/1998 dibandingkan tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 beberapa kota tetap memiliki keuangan yang rendah sekali, bahkan diawal era otonomi persentase rasio kemandirian cenderung lebih kecil. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah kota kepada pemerintah pusat yang sangat tinggi, artinya pembiayaan pengeluaran sebagian besar diperoleh dari dana perimbangan. Dengan kata lain dapat dikatakan semakin besar proporsi PAD terhadap APBD, maka kualitas otonomi daerah akan semakin semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, bila semakin besar subsidi pemerintah pusat terhadap anggaran belanja daerah maka akan mengakibatkan semakin meningkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat, yang pada akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah.

Tingginya ketergantungan fiskal di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur karena disebabkan beberapa hal, yaitu: pertama, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama, yang paling produktif dan elastisitas baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat. Kedua, walaupun pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah.

Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah maka dapat diketahui dengan mengukur proporsi kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Secara teoritis kemandirian keuangan daerah akan terlihat dari kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Hal ini dikarenakan pengeluaran rutin yang sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai dan guru mempunyai multiplier effect yang kecil terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah.

PAD daerah belum bisa menutup pengeluaran rutin, kecuali Kota Surabaya di waktu sebelum otonomi. Hampir semua daerah, kontribusi PAD terhadap pengeluaran rutin antara sebelum dan sesudah Otonomi mempunyai kecenderungan yang menurun. Ketidak mampuan PAD menutup pengeluaran rutin ini, bukan semata-mata karena kinerja keuangan Pemerintah Daerah memburuk. Bisa dilihat dari angka PAD, antara sebelum dan sesudah Otonomi terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Ketidak mampuan PAD membiayai pengeluaran rutin diduga disebabkan karena adanya pelimpahan gaji pegawai dan guru ke kas pemerintah daerah.

Dalam menilai kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan PAD dalam membiayai berbagai pengeluarannya. Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pusat di satu sisi dan rendahnya peranan PAD dalam penerimaan daerah, di sisi lain membawa konsekuensi rendahnya kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Kondisi semacam ini tentu saja sangat menyulitkan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab seperti diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004.

PAD tidak bisa untuk membiayai pengeluaran pembangunan baik di era sebelum otonomi maupun pada era otonomi, kecuali Kota Surabaya di masa sebelum otonomi. Sedangkan jika dilihat kemampuan daerah menghimpun PAD cukup bagus, jumlah PAD di semua daerah baik yang berada di wilayah pertumbuhan tinggi maupun rendah semua mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi hasil yang

meningkat dari PAD pada era otonomi daerah itu tidak ada satupun pemerintah kota di Jawa Timur yang mampu membiayai pengeluaran pembangunan.

Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi diperoleh dari pendapatan pungutan pajak atau retribusi dan hal ini menunjukkan bahwa perolehan pajak dari pendapatan rumah tangga konsumen, produsen maupun masyarakat pengguna sarana maupun prasarana pemerintah semakin meningkat, jika pendapatan meningkat permintaan agregat meningkat dan output meningkat sehingga Pruduk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat pula, dan terjadi pertumbuhan ekonomi. Disatu pihak dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memperbesar pendapatan pemerintah daerah yang akan digunakan untuk belanja rutin/aparatur maupun belanja pembangunan/pelayanan publik sehingga Pruduk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dan terjadi pertumbuhan ekonomi. Kontribusi elastisitas PAD terhadap PDRB.

Elastisitas PAD yang paling tinggi di Kota Blitar yaitu sebesar 3,74. Artinya jika PDRB di Kota Blitar meningkat sebesar 1 persen akan berakibat naiknya penerimaan PAD sebesar 3,74 persen. Dan yang paling kecil di Kota Malang yaitu hanya 0,66 artinya jika PDRB meningkat 1 persen, PAD nya meningkat 0,66 persen dan Kota Surabaya yaitu hanya sebesar 0,69 artinya jika PDRB Kota Surabaya meningkat sebesar 1 persen, PAD nya meningkat hanya 0,69 persen. Ini menunjukkan selain Kota Malang dan Kota Surabaya semua daerah Kota di Jawa Timur mempunyai Elastisitas PAD yang lebih besar dari 1 (satu). Dan bisa dikatakan semakin besar pertumbuhan PDRB maka penerimaan PAD juga akan meningkat dalam presentase yang lebih besar dari kenaikan PDRB.

Struktur pendapatan Asli daerah (PAD) beberapa Kota di Jawa Timur masih didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah, Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran BUMD dalam PAD Kota, oleh karena itu perlu ditingkatkan pemasukannya sendiri,

meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pengeluaran umum yang efisien, serta memperkuat proses-proses penganggaran, pencatatan keuangan, pengadaan dan pemeriksaan.

Peningkatan sumber daya dan penerimaan kota dapat dicapai dengan perpajakan dan retribusi daerah, peminjaman, *cost recovery* dan kemitraan swasta-publik. Pemerintah daerah perlu menelusuri upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas finansialnya dengan mengembangkan basis pajak, meningkatkan pengumpulan pajak dan retribusi, merasionalkan pengeluaran, mempromosikan kemitraan swasta-pemerintah dalam menyediakan pelayanan kota dan menggunakan lahan kota sebagai sumber daya yang penting, merestrukturisasi kesulitan BUMD dan instansi layanan publik pemerintah lainnya agar lebih *profitable* dan meningkatkan *cost recovery* untuk pelayanan. Dalam membiayai investasi infrastrukturnya perlu mengatur sumber daya substansial dari sektor swasta, sehingga dibutuhkan pembentukan kelembagaan dan peraturan lingkungan yang menarik investasi swasta dalam bidang infrastruktur. Partisipasi swasta yang baik dapat tercapai dengan adanya kerjasama pemerintah dan swasta yang didukung oleh strategi pengembangan ekonomi lokal (PEL) yang komprehensif.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus-menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran / penilaian atas pungutan daerah, sehingga perlu dilakukan pengukuran/ penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi.

Rasio Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang direncanakan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen, apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rata-rata rasio efektivitas pada kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 2005 lebih baik dibandingkan kurun waktu tahun 1993/1994 sampai dengan 1997/1998. Hal ini menunjukkan bahwa di era otonomi daerah beberapa kota telah mampu merealisasikan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang ditargetkan. Saat ini, sistem perpajakan daerah masih sangat lemah, sehingga menyebabkan banyak potensi pajak dan retribusi yang tidak tergali. Pemerintah daerah harus dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta pemerintah daerah perlu meneliti apakah ada penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan disalah gunakan oleh petugas di lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme *reward and punishment*.

Untuk meningkatkan rasio efektivitas dapat pula dilakukan dengan penyederhaan prosedur administrasi dan meningkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*), sedangkan peningkatan prosedur pengendalian intern pemerintah agar terpenuhi prinsip *accountability*.

Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Beberapa Kota di Jawa Timur lebih memprioritaskan belanja

rutin /aparatur dibandingkan belanja pembangunan/investasi.

Besarnya rasio aktivitas belanja sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio aktivitas belanja pembangunan/investasi yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Secara teoritis dibandingkan pengeluaran rutin, pengeluaran Pembangunan mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran pembangunan mempunyai dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Di dalam literature-literature, implementasinya pengeluaran pembangunan ini disamakan dengan Investasi pemerintah yang bersifat *social investment* yang mempunyai kecenderungan berbentuk *Aoutonomous Investment*. Secara teoritis *social Investment* ini multipliernya kalah besar dibandingkan dengan *Privat Investment*. Tetapi pengeluaran ini harus ada dan harus semakin diperbesar dari tahun ke tahun guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan untuk pembiayaan barang publik yang diperlukan masyarakat. Dari data yang ada diatas besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah kota di Jawa Timur, menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan yang semakin besar, secara nilai nominalnya. Semua daerah yang ada di Jawa Timur baik daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maupun yang rendah. Kalau proporsi dana pembangunan sebelum otonomi berada pada rentang 41,48% - 54,30 %, setelah otonomi rentang itu semakin tinggi yaitu 37,96 % - 57,82 %. Hal ini mencerminkan adanya trend yang menggembirakan karena alokasi dana publik sudah seharusnya lebih banyak untuk keperluan yang langsung berkaitan

dengan kepentingan publik. Karena pengeluaran pembangunan akan mempunyai dampak multiplier yang lebih cepat dan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan pengeluaran rutin.

Elastisitas belanja rutin terhadap PDRB yang paling tinggi di Kota Madiun yaitu sebesar 11,97. Artinya jika PDRB di Kota Madiun meningkat sebesar 1 persen akan berakibat naiknya belanja rutin sebesar 11,97 persen. Dan yang paling kecil di Kota Surabaya yaitu hanya 0,98 artinya jika PDRB meningkat 1 persen, belanja rutinnya meningkat 0,98 persen. Hal Ini menunjukkan selain Kota Surabaya semua daerah Kota di Jawa Timur mempunyai Elastisitas belanja rutin yang lebih besar dari 1 (satu). Dan bisa dikatakan semakin besar pertumbuhan PDRB maka belanja rutin juga akan meningkat dalam presentase yang lebih besar dari kenaikan PDRB.

Elastisitas belanja pembangunan terhadap PDRB yang paling tinggi di Kota Madiun yaitu sebesar 13,56. Artinya jika PDRB di Kota Madiun meningkat sebesar 1 persen akan berakibat naiknya belanja pembangunan sebesar 13,56 persen. Dan yang paling kecil di Kota Surabaya yaitu hanya 1,17 artinya jika PDRB meningkat 1 persen, belanja pembangunannya meningkat 1,17 persen. Hal Ini menunjukkan semua daerah Kota di Jawa Timur mempunyai Elastisitas belanja pembangunan yang lebih besar dari 1 (satu). Dan bisa dikatakan semakin besar pertumbuhan PDRB maka belanja pembangunan juga akan meningkat dalam persentase yang lebih besar dari kenaikan PDRB atau pertumbuhan belanja pembangunan menimbulkan peningkatan pada PDRB.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Ternyata terjadi peningkatan rasio pertumbuhan APBD yang sangat besar di era otonomi daerah, hal ini

dikarenakan konsekuensi adanya otonomi daerah sehingga daerah mendapatkan dana perimbangan yang cukup besar untuk membiayai gaji pegawai yang semula menjadi beban pemerintah pusat berubah menjadi beban pemerintah daerah. Besarnya pertumbuhan pendapatan pasti akan diimbangi dengan pertumbuhan belanja .

Untuk mengetahui peranan APBD terhadap PDRB maka dapat di ketahui melalui hasil perbandingan antara rata-rata APBD beberapa kota terhadap PDRB nya sebelum otonomi maupun pada era otonomi.

Pada rentang waktu sebelum otonomi dengan pada era otonomi besarnya APBD untuk beberapa Kota dan PDRB terjadi peningkatan. Namun peningkatan APBD jauh lebih besar dibandingkan peningkatan PDRB. Kondisi seperti ini dapat menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi di beberapa kota Jawa Timur berkembang lebih lambat dari perkembangan keuangan pemerintah daerah. Akibatnya kondisi seperti ini proporsi APBD terhadap PDRB terjadi peningkatan. Bila pada era sebelum desentralisasi tahun 2001 proporsinya APBD Kota masih sebesar 0,28 % sampai dengan 3,88 %, justru pada era desentralisasi tahun meningkat menjadi 0,89 % sampai dengan 22,33 %. Kecilnya proporsi APBD terhadap PDRB menunjukkan peranan pemerintah daerah dalam perekonomian daerah adalah kecil.

Selama kurun waktu era otonomi terjadi peningkatan persentase rata-rata kinerja APBD, hal ini dikarenakan tingginya ratio efektivitas dan ratio pertumbuhan sedangkan untuk rasio kemandirian masih diperlukan peningkatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, sedangkan rasio aktivitas masih harus meningkatkan prioritas aktivitas belanja pembangunan/ investasi. Upaya peningkatan pelayanan publik dapat dicerminkan dari realisasi pengeluaran pembangunan. Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran rutin sehingga seyogyanya alokasi dana pembangunan lebih

ditingkatkan untuk investasi infrastruktur kota dan penunjang perekonomian.

Konsekuensi logisnya adalah alokasi anggaran daerah harus dapat mencerminkan *local demand* dan *public oriented*. Kinerja anggaran daerah harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Sedangkan *value for money* yaitu pengelolaan anggaran harus bersifat ekonomis yaitu meminimalisir input resources yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang bersifat boros dan tidak produktif, efisiensi yaitu pencapaian output maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu, dan efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Kesejahteraan Masyarakat

Dimensi kesejahteraan yang sangat luas dan kompleks akan dilihat dari aspek Pendapatan Regional Bruto per kapita, aspek pendidikan dan aspek kesehatan.

Dari keempat indikator kesejahteraan terjadi peningkatan, peningkatan ini terjadi dalam konteks demografis, dimana walaupun jumlah penduduk masih terus bertambah tetapi kecepatan pertumbuhannya terus berkurang sebagai akibat turunnya angka kelahiran atau keberhasilan program keluarga berencana (KB).

Peningkatan taraf kesejahteraan juga ditunjukkan oleh tiga indikator yang berdampak untuk bidang pendidikan dan kesehatan yaitu, kenaikan angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (L

Sek) dan kenaikan angka harapan hidup (AHH). Beberapa indikator kesejahteraan harus selalu meningkat sesuai dengan standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan nasional, dan hal ini harus dicapai semua daerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kota di Jawa Timur antara lain; di bidang perekonomian antara lain: adanya program kemitraan pengembang Ekonomi Lokal (KPEL), Pemberdayaan Perempuan pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) dan berbagai kredit lunak yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha, di bidang pendidikan antara lain adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina keluarga Balita (BKB), Wajib Belajar 9 tahun atau 12 Tahun, bantuan operasional Sekolah (BOS) di bidang Kesehatan antara lain dengan adanya program pemberian makanan tambahan untuk Anak Sekolah (PMTAS), POSYANDU, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), perbaikan sanitasi, bedah rumah dan lain sebagainya. Semua program itu merupakan input atau investasi yang akan memberikan dampak sesuai yang diharapkan jika implementasi program berjalan dengan benar.

Kesimpulan

Kinerja APBD berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebelum otonomi daerah dengan koefisien jalur 0,714 dan taraf signifikansi 0.000. Pada saat sebelum otonomi daerah berbagai program pembangunan regional diarahkan pada pengembangan potensi dan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana dasar yang ada, sehingga swadaya dan kreativitas masyarakat dapat ditingkatkan misalnya upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi), yang kesemua kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan, pendidikan,

dan kesehatan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kinerja APBD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada era otonomi daerah dengan koefisien jalur 0,092 dengan taraf signifikan 0.352. Pada saat awal era otonomi daerah, kebijakan dan arah pembangunan lebih banyak ditentukan oleh daerah. Namun pada sisi lain juga berpeluang menimbulkan eksekusi tidak tercapainya kesejahteraan di daerah, misalnya melambatnya pengembangan dan adopsi teknologi serta pengelolaan investasi skala besar seperti industri yang tidak efisien, program JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang mengabaikan unsur keswadayaan atau adanya penyimpangan penyaluran dana JPS yang tidak terlepas dari sistem birokrasi, berbagai upaya pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberian bantuan dana bergulir untuk modal usaha bagi penduduk miskin tidak efektif, karena dana akhirnya tidak dapat digulirkan lagi. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, dengan naiknya harga BBM yang menyebabkan sektor riil yang sudah mulai bangkit kembali terpuruk sehingga berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, demikian juga kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji pegawai negeri yang menyebabkan kenaikan upah di sektor lainnya meningkat juga kenaikan harga dan biaya hidup. Tetapi kinerja APBD berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan peranan pemerintah untuk membuat berbagai program dan proyek yang bersifat dapat menyerap tenaga kerja.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln, 2006, "Ekonomi Pembangunan", STIE YKPN, Yogyakarta
- Baswir, Revrison, 2000, "Akuntansi Pemerintahan Indonesia", BPFE, Yogyakarta
- Boediono, 2005, "Ekonomi Makro" Edisi 4, BPFE, Yogyakarta

- BPS Propinsi Jawa Timur, 2001, "Jawa Timur Dalam Angka 2000"
- , 2002, "Jawa Timur Dalam Angka 2001"
- , 2003, "Jawa Timur Dalam Angka 2002"
- , 2004, "Jawa Timur Dalam Angka 2003"
- , 2005, "Jawa Timur Dalam Angka 2004"
- , 2006, "Jawa Timur Dalam Angka 2005"
- Brata, Aloysius, Gunadi, 2004, "Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional", Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Boediono, 2005, "Ekonomi Makro", edisi 4, BPFE, Yogyakarta
- Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang "Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah"
- Dornbusch, Rudiger, 1991, "Ekonomi Makro", Rineka Cipta Jakarta
- Dumairy, 1996, "Perekonomian Indonesia", Erlangga, Jakarta
- Feldman, Allan M, 2000, "Ekonomi Kesejahteraan", Alih Bahasa R. Maryatmo dkk, Andi Offset, Yogyakarta
- Ferdinand, Augusty, 2005, "Structural Equation Modeling", Badan Penerbit UNDIP
- Ghozali, Imam, 2006, "Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square", Badan Penerbit – UNDIP Semarang
- Hakim, Abdul, 2004, "Ekonomi Pembangunan", Ekonisia, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2004, "Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah", UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hendrasto, Tatot, 2003, "Pengaruh Dana Hasil Bagi Sumber Daya Alam, Minyak Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional" Tesis, Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta
- Karl E. Case & ray C. Fair, "Prinsip-prinsip Ekonomi Makro", Alih Bahasa Benyamin Molan, 2004, PT. Indeks, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan", UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Makmun, 2003, "Potret Perekonomian Daerah Sebelum dan Era Desentralisasi Fiskal", Hasil Penelitian
- Mangkoesobroto, Guritno, 1991, "Ekonomi Publik", BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Andi, Yogyakarta
- , 2002, "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah", Artikel Jurnal Ekonomi Rakyat.
- , 2005, "Akuntansi Sektor Publik", Andi, Yogyakarta
- Mawardi, 2004, "Dampak Investasi Pemda Jawa Barat Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan lainnya", Tesis, Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta
- Munir, Badrul, 2003, "Perencanaan Anggaran Kinerja Memangkas Inefisiensi Anggaran daerah", Samawa Center, Yogyakarta.
- Mulyadi, Rudy, 2005, "Peranan Pengeluaran dan Penerimaan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-propinsi di Indonesia Tahun 1991-1999", Tesis, Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Musgrave, Richard, A., 1991, "Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek", Erlangga, Jakarta

- Nanga, Muana, 2005, "Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Panjaitan, Mangasi, 1996, "Pengeluaran Pemerintah (APBN) Variabel yang Mempengaruhi dan Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama PJP-I", Tesis, Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang No.17/1965 tentang "Keuangan Daerah".
- , Undang-undang No.5/1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah".
- , TAP MPR RI No.X/MPR/1998 tentang "Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara".
- , TAP MPR RI No.XV/MPR/1998 tentang "Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Pembagian Keuangan Pusat dan daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- , Undang-undang No.22/1999 tentang "Pemerintah Daerah".
- , Undang-undang No.25/1999 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah".
- , Undang-undang No.28/1999 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme".
- , Undang-undang No.33/2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah".
- , Peraturan Pemerintah No.105/2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah".
- , Peraturan Pemerintah No.108/2000 tentang "Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah".
- , Peraturan Pemerintah No.25/2000 tentang "Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom".
- Rosyidi, Suherman, 2004, "Pengantar Teori Ekonomi, Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabeni, Arifin, 2001, "Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan", BPFE, Yogyakarta
- Sadli, M., 2005, 28 Maret, "Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Dipaksakan", Suara Merdeka
- Samuelson, Paul A., William D.Nordhaus, 2004, "Ilmu Makro Ekonomi", Edisi Tujuh belas, PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Sidik, Machfud, 2002, 17 April, "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Public Sector Scorecard, Jakarta
- Soekanto, Reksohadiprojo, 2001, "Ekonomi Publik" BPFE, Yogyakarta
- Solimun, 2004, "Structural Equation Modeling", Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sukirno, Sadono, 2005, "Makro Ekonomi Moderen", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2006, "Ekonomi Pembangunan" Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Suparmoko, 2000, "Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek", BPFE, Yogyakarta
- Swasono, Sri-Edi, 2005, "Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar, The Real War: Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi", PUSTEP-UGM, Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson, MRP, 2005, "Ekonomi Regional Teori dan

- Aplikasinya”, PT. Bumi Aksara,
Jakarta
- Todaro, Michael P & Smith, Stephen C,
2004, “Pembangunan Ekonomi di
Dunia Ketiga”, Erlangga, Jakarta.
- Wibowo, Tri, 2004, “Potret Fiskal Daerah
Sebelum dan Pada Era
Desentralisasi”, Hasil Penelitian.

